

Ekonomi kapitalis yang berkarakter in-dividualisme telah mengakselerasi de-humanisasi pada mayoritas negeri. Fakta kemiskinan dan ketimpangan global menjadi salah satu indikatornya.

Data FAO (2013) membeberkan fakta bahwa satu dari delapan orang penduduk dunia setiap malamnya tidur dalam kondisi kelaparan. Data lain menunjukkan bahwa 30 persen total kekayaan dunia dikuasai hanya oleh 0,001 persen penduduk dunia. Bahkan, pada negara-negara kaya, sebanyak 20 persen penduduknya berpendapatan 8.000 kali pendapatan orang miskin, padahal 40 tahun lalu berkisar 3.000 kali.

Terjadinya konflik perburuhan, konflik agraria, serta berbagai disharmoni sosial yang terus berlangsung hingga sekarang ini, baik level lokal, nasional, maupun internasional, tidak lepas dari *mainstream* ekonomi yang berstruktur ketidaksiadian. Jika tidak segera ada pembalikan tata kelola ekonomi makro maupun mikro, tak pelak ke-mafaatan kolektif, baik yang berposisi sebagai pekerja, pemodal, maupun regulator, secara ja-mak akan mengalami distorsi.

Intensitas demonstrasi, pemogokan, boikot, pendudukan aset, dan berbagai ekspresi kaum tertindas semakin mengemuka, bahkan terpaksa diekspresikan dengan anarkis agar mencuri per-

SIYAR RAMADHDHAN

Oleh: **Ahmad Ma'rif**
Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah,
Staf Pendidik Ilmu Ekonomi UMY

Ekonomi Berjamaah

hatian publik. Tercatat, tiga dari lima demonstrasi di negeri ini bersumber dari ketidakadilan distribusi ekonomi. Isu tuntutananya selalu seputar: penyesuaian upah buruh, penolak kebijakan diskriminatif, perlakuan atas penyerobotan aset wong cilik oleh kaum pemodal, pernyataan persai-ngan usaha, dan isu lain yang secara substansi mengekspresikan ada perlawanan kelas sosial.

Bagi dunia Islam, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara gamblang yang harusnya dikembangkan adalah membangun struktur ekonomi yang berlandaskan humanisme, yaitu "Ekonomi Syariah", yang dalam konteks Indonesia segaris dengan konsep "Ekonomi Pancasila". Sayang, roh sistem ekonomi ini tidak pernah bersemayam dalam kebijakan pe-rekonomian nasional. Bahkan, roh ini dipenjara dan dibuang jauh dengan dalih modernisasi dan

globalisasi ekonomi. Implikasinya cukup serius, rakyat tidak kuasa di tanahnya sendiri, pemerin-tah tersandera pada asing setiap mengambil kebijakan. Artinya, kedaulatan ekonomi secara sadar dan sistematis dimatikan sendiri oleh para pemangku amanah di negeri ini.

Pada hal, pada level global, gejala disharmoni ekonomi-sosial yang mengglobal telah menjadi perhatian khusus dari berbagai lembaga inter-nasional, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Buruh Internasional (ILO), Aliansi Koperasi Internasional (ICA), dan Organisasi Perdagangan Berkeadilan (WFTO), dan organisasi lainnya yang berupaya mengoreksi secara sistemik. Salah satu yang menarik adalah upaya

global membangkitkan kembali tata ekonomi komunal yang berbasis keadilan dalam kepemilikan aset, pola organisasi bisnis yang demokratis, dan kepatuhan asas *corporate good governance*.

Menyadari kerakusan ekonomi kapitalis selama ini, pada akar rumput mulai mengental praktik ekonomi komunal, alias sistem ekonomi berjamaah dalam bentuk kelompok usaha bersama, koperasi, atau pun *joint investment* dengan akad yang adil. Dalam Islam, berjamaah dalam perekonomian menjadi kebutuhan sebagaimana perintah Allah SWT agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. ■

